



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 700/Kep.780A-Inspektorat/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 700/Kep.959-Inspektorat/2019 TENTANG PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* yang sangat berdampak pada kesehatan, ekonomi, sosial hingga perlambatan ekonomi dan penurunan pendapatan nasional, telah ditetapkan sebagai Darurat Nasional Kesehatan Masyarakat, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan pendampingan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan guna mewujudkan efektifitas, sinergitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Majalengka serta sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka Nomor 700/Kep.959-Inspektorat/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 700/Kep.959-Inspektorat/2019 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : DRAFT KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 700/Kep.780A-Inspektorat/2020
 Tanggal : 2 November 2020
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 MAJALENGKA NOMOR 700/Kep.959-
 Inspektorat/2019 TENTANG PROGRAM
 KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2020

**POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan sinergitas pelaksanaan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 masa Penanganan COVID-19, perlu adanya perubahan program kerja pengawasan tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

Perubahan Arah Kebijakan Pengawasan Fungsional dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*).

II. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**Tujuan dan Sasaran Rencana Startegis Inspektorat Kabupaten Majalengka
 Tahun 2019-2023**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka	Nilai	BB
				Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP A	Persen	25

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020
		Persentase Tindaklanjut terhadap Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	80
		Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya Pemerintahan Daerah yang bersih berintegrasi	Tingkat maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3
2	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Government and Clean Governance</i>)	Tingkat Kapabilitas APIP	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

3.1. Tugas Pokok

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati/Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5) Pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan fungsi tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
3. Audit Operasional Desa
4. Monitoring BOS
5. Reviu;
6. Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan;
 - a. Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa (Probity Advice);
 - b. Penerapan Sistem Manajemen Risiko;
7. Evaluasi SPIP;
8. Tindak Lanjut dan Monev Hasil Pengawasan;
9. Pemeriksaan Khusus/Kasus/Tujuan tertentu;
10. Monev Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas;
11. Audit Operasional Perangkat Daerah;
12. Peningkatan Maturitas SPIP;
13. Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.3. Koordinasi

1. Secara Internal Inspektorat Kabupaten Majalengka melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait baik dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pengawasan.
2. Secara Eksternal Inspektorat Kabupaten Majalengka melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya terutama dalam rangka sinergitas penyusunan PKPT agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga pengawasan dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

IV. TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bertujuan untuk:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pelaksanaan pengawasan meliputi :

I. Pengawasan Umum, dengan fokus :

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, meliputi :
 - a. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari provinsi kepada kabupaten;
 - b. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari kabupaten kepada provinsi;
 - c. Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, meliputi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga unit kerja pengadaan barang dan jasa.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan standar kompetensi berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara paling sedikit 20 (dua puluh) Jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan system seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan penerapan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional sesuai kompetensi;
 - e. Penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Korelasi penilaian efektivitas kinerja pegawai dengan pemberian tunjangan
 - g. Pembinaan dan penilaian pegawai dalam di Lingkungan OPD
4. Keuangan Daerah, meliputi :
 - a. Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e. Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial;
 - f. Kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.

5. Pengadaan barang dan jasa
 - a. Kebijakan pengadaan barang dan jasa
 - b. Evaluasi pengadaan barang dan jasa
 - c. Menilai ketaatan terhadap ketentuan PBJ
 - d. Melakukan pengawasan terhadap proses PBJ dalam :
 - Tahap Perencanaan dan Persiapan
 - Tahap Pemilihan Penyedia
 - Tahap Pelaksanaan Kontrak
 - Tahap Pemanfaatan Barang dan Jasa
6. Pembangunan daerah, meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
7. Pelayanan publik di daerah, meliputi :
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*);
 - c. Kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
8. Kerjasama Daerah, meliputi :
 - a. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga;
 - c. Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
9. Kebijakan daerah, meliputi :
 - a. Kepatuhan terhadap kebijakan daerah, meliputi :
 - 1) Evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) Fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) Klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) Pemberian nomor register;
 - 5) Pembatalan peraturan kepala daerah.
 - b. Kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. Capaian program pembentukan peraturan daerah.
10. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, meliputi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- b. Pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Fokus dan Sasaran Pengawasan Teknis

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, meliputi :
 - a. Jumlah keluarga miskin yang menjadi peserta JKN
 - b. Meningkatnya Status Akreditasi Puskesmas, dan UPTD Labkesda.
 - c. Meningkatnya cakupan Puskesmas memenuhi standar.
 - d. Terpenuhi SPM Kesehatan poin 1-5, 7
 - e. Meningkatnya Indikator Keluarga Sehat (PIS-PK)
 - f. Terpenuhi Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
 - g. Terpenuhi Sarana dan Prasarana dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
 - h. Terwujudnya Kapabilitas Aparatur.
 - i. Terpenuhi Pelayanan Dasar Perkantoran.
 - j. Adanya Gedung Rawat Jalan yang Representatif.
 - k. Pengendalian Penyakit akibat dampak asap rokok.
 - l. Infrastruktur Rumah Sakit Baru dibangun;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, meliputi :
 - a. Cakupan Pelayanan Air Bersih
 - b. Penurunan Jumlah Rumah Layak Huni Keluarga Miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - c. Persentase Rumah Tangga yang mengakses sanitasi baik.
 - d. Tersusunnya Standarisasi Pelayanan Publik.
 - e. Kelancaran Mobilitas Orang, Barang dan Jasa.
 - f. Indikator Kinerja Tata Ruang.
 - g. Terpenuhi SPM Pelayanan Publik.
 - h. Tersedianya Regulasi Tata Ruang.
 - i. Jumlah taman kota terbangun.
 - j. Terpenuhi Ketersediaan Pangan Masyarakat.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, meliputi :
 - a. Implementasi Jaring Pengaman Sosial.
 - b. Jumlah RTS yang memperoleh Program Jaminan Sosial.
 - c. Jumlah Lansia yang mendapat bantuan “Rantang Kanyaah”.
 - d. Jumlah Kelompok Usaha bersama keluarga miskin yang mandiri.
 - e. Terpenuhi SPM Pelayanan Publik.
 - f. Pendapatan Melampaui Batas Garis Kemiskinan Sebesar 2400 Kilo Kalori Perorang Perhari.

- g. Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan.
 - h. Tingkat Kamtibmas (Perilaku Masyarakat yang Menghindari Konflik).
 - i. Meminimalisir Risiko Dampak Bencana.
 - j. Pemenuhan Kebutuhan Penduduk Miskin Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pangan.
 - k. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Wilayah Industri Hasil Tembakau (IHT).
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
- a. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri.
 - b. Terwujudnya Keluarga Sejahtera (8 Fungsi Keluarga)
 - c. Peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan.
 - d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, meliputi :
- a. Pemenuhan regulasi pelaksanaan perizinan (perkada tentang pelimpahan perizinan, SOP serta Kode Etik pelayanan perizinan).
 - b. Pemenuhan infrastruktur pelayanan perizinan.
 - c. Pelaksanaan proses perizinan dari saat pendaftaran hingga izin dikeluarkan sertra evaluasi pelayanan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, meliputi :
- a. Rata-rata peningkatan omzet usaha mikro keluarga miskin.
 - b. Pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - c. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
 - d. Penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil menengah.
 - e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - f. Peningkatan kelembagaan koperasi.
 - g. Peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
 - h. Pengawasan koperasi.
 - i. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, meliputi :
- a. Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin.
 - b. Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan PAUD.
 - c. Persentase peningkatan Warga Belajar Paket A/B/C
 - d. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi.

- e. Terpenuhinya Ruang Guru, Ruang Kelas dan Laboratorium.
 - f. Peningkatan Jumlah Prestasi Masyarakat.
 - g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
 - h. Peningkatan Kualitas Afektif Anak Sekolah.
 - i. Peningkatan IQ pada Tahapan Pendidikan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Dasar.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, meliputi :
- a. Jumlah Desa Wisata.
 - b. Jumlah Kunjungan Event
 - c. Tumbuhnya Perilaku Masyarakat yang Menghindari Konflik (Tingkat Kamtibmas).
 - d. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya.
 - e. Revitalisasi Museum.
 - f. Fasilitas komunitas budaya.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, meliputi pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, meliputi :
- a. Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan).
 - b. Pencapaian Nilai Tukar Petani (NTP) Menjadi 130%.
 - c. Terpenuhinya Ketersediaan Pangan Masyarakat.
 - d. Meningkatkan produksi dan mutu hasil tembakau.
 - e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian.
 - f. Optimalisasi lahan.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, meliputi :
- a. Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi.
 - b. Pembangunan sentra industri kecil menengah.
 - c. Revitalisasi sentra industri kecil menengah.
 - d. Pertumbuhan wira usaha baru.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
- a. Pemeliharaan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Jumlah deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - d. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - e. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - f. Penegakan peraturan daerah;
 - g. Rencana penanggulangan bencana;
 - h. Mitigasi/pencegahan bencana;
 - i. Pemetaan rawan kebakaran;

- j. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah;
 - k. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
- a. Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - b. Pemberian nomor induk kependudukan (NIK);
 - c. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional;
 - f. Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - g. Verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah kabupaten;
 - h. Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - i. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten;
 - j. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - k. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data base kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - l. Penyediaan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serentak;
 - m. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
- a. Jumlah pengurus BPD dan Aparat Desa yang telah mengikuti diklat.
 - b. Persentase ketepatan waktu penyusunan APBDes.
 - c. Jumlah Badan Usaha milik desa yang kurang aktif.
 - d. Terpenuhinya Sarana Indikator PHBS.
 - e. Peningkatan Indeks Produktifitas Sumber Daya Ekonomi.
 - f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa.
 - g. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembangunan.
 - h. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Kemasyarakatan.
 - i. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan.

III. Fokus dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah difokuskan kepada :

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :

- 1) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) Pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Hibah dan bantuan sosial;
 - 4) Belanja barang dan jasa;
 - 5) Belanja modal;
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 - c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. Kinerja Rutin Pengawasan

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada Daerah Kabupaten, meliputi :

1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. Reviu rencana kerja pemerintah daerah;
3. Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
4. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Reviu laporan kinerja;
6. Reviu penyerapan anggaran;
7. Pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
8. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :
 - a. Pemeriksaan investigative;
 - b. Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;
 - c. Penghitungan kerugian keuangan negara.
9. Pemeriksaan serentak kas opname;
10. Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
11. Evaluasi system pengendalian internal pemerintah;
12. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
14. Pemeriksaan BOS.

V. Pengawasan Prioritas Nasional

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi :

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);

5. Pemerintah daerah kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah;
7. Gugus Tugas Tanggap Darurat Penanganan Covid-19

VI. Pengawasan Reformasi Birokrasi

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi :

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - a. System pengendalian intern pemerintah;
 - b. Kapabilitas APIP;
 - c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. Penilaian internal zona integritas;
 - e. Penanganan benturan kepentingan;
 - f. Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*);
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi pelayanan publik.

VII. Penegakan Integritas

Kegiatan penegakan integritas pada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten, meliputi :

1. Survey penilaian integritas;
2. Penanganan laporan gratifikasi;
3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi;
4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. Peningkatan Kompetensi APIP

Peningkatan Kompetensi APIP, dengan fokus :

1. Pelatihan Diklat Teknis Substantif;
2. Pelatihan Kantor Sendiri;
3. Diklat Penjenjangan;
4. Asistensi.

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah kabupaten Majalengka, meliputi :

1. Aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dengan didukung oleh sarana prasarana keagamaan dan pemberdayaan pembimbing keagamaan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar urusan Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan tuntas.
3. Pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan pertanian, industri dan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penambahan ruang terbuka hijau serta penanggulangan bencana.
5. Peningkatan kinerja, akuntabilitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah dan di berbagai sector.
7. Pembangunan infrastruktur di Kawasan strategis sekitar BIJB, Kertajati Aerocity, PKW Kadipaten, dan PKL Talaga.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis individu, keluarga dan pemberdayaan masyarakat miskin.
9. Penumbuhan Desa Mandiri, termasuk pengembangan Desa Tematik

VI. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

1. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2020 adalah :

- a. Audit Kinerja terhadap Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa;
- b. Pemeriksaan Khusus (Tujuan Tertentu) atas perintah Kepala Daerah atau pengembangan hasil pemeriksaan;
- c. Pemeriksaan Tujuan Tertentu didasarkan Pengaduan Masyarakat dan atas permintaan dari pihak APH.
- d. Pelaksanaan reviu, evaluasi dan monitoring.

2. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pengawasan terdiri atas :

- a. Evaluasi, meliputi :
Evaluasi Dokumen SAKIP terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan.
- b. Reviu, meliputi :
 1. Reviu RPJMD, RKPD, Renja, KUAPPAS dan RKA
 2. Reviu Penyerapan Anggaran/Barang Jasa
 3. Reviu LAKIP, LKPD
 4. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Out Put Kegiatan DAK Fisik.
- c. Monitoring, meliputi :
Monitoring pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Konsultasi
Penyediaan layanan jasa konsultasi bagi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
- e. Audit Kinerja Perangkat Daerah (Dinas/Lembaga) dan BUMD meliputi aspek :
 1. Kebijakan;
 2. Kelembagaan;

3. Kepegawaian;
 4. Keuangan;
 5. Barang / Aset.
- f. Audit Kinerja terhadap Kecamatan meliputi aspek :
1. Kebijakan;
 2. Kelembagaan;
 3. Kepegawaian;
 4. Keuangan;
 5. Barang / Aset.
- g. Audit Kinerja terhadap Pemerintahan Desa meliputi aspek :
1. Kebijakan;
 2. Kelembagaan;
 3. Keuangan;
 4. Barang/Aset;
 5. Penyaluran BLT dan
 6. Penanganan COVID-19
- h. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, meliputi :
1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP, Itjen Departemen Dalam Negeri dan BPK RI, yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa sepanjang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun sebelumnya.
 2. Pra Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP, Itjen Departemen Dalam Negeri dan BPK RI.
 3. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP, Itjen Departemen Dalam Negeri dan BPK RI.
- i. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif, meliputi :
1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawasan internal maupun external dalam rangka mensinergikan penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawasan internal dan external dalam pelaksanaan pemeriksaan;
 3. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Tingkat Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- j. Pemeriksaan Khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu, meliputi :
- Pemeriksaan yang dilakukan untuk menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan sehubungan dengan adanya laporan (pengaduan) yang diterima dari masyarakat baik yang diterima langsung dan atau melalui Bupati maupun limpahan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat (dalam hal ini khususnya dari Inspektorat Jenderal), Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Batasan mengenai pengaduan masyarakat ini menyangkut tentang laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- 1) Penyalahgunaan wewenang.
 - 2) Hambatan dalam pelayanan masyarakat.
 - 3) Korupsi, kolusi dan nepotisme, dan
 - 4) Pelanggaran disiplin pegawai.
- k. Bantuan Keuangan Fasilitasi Pengawasan Kepada Kabupaten/Kota (Banprop) :
- Fasilitasi pengawasan dalam upaya meningkatkan keterampilan, kemampuan Wawasan dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan
- l. Audit Kinerja BUMD

Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BUMD pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan/ekonomis, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
 - m. Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Dilaksanakannya diklat pengawasan yang meliputi pelatihan materi kepengawasan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka dan menghadirkan narasumber dari BPKP.
 - n. Pelatihan Teknis Tenaga Pemeriksa dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jabatan Fungsional.

Dilaksanakannya Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dalam rangka terwujudnya APIP yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang efektif.

VII. OBYEK PEMERIKSAAN (AUDITAN)

Sesuai dengan sasaran kebijakan pelaksanaan pengawasan, objek pengawasan (audit) dalam Pemeriksaan Internal Secara Berkala, yaitu sebagai berikut :

A. Perangkat Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga
7. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

11. Dinas Sosial
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
14. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
17. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Sekretariat Daerah
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Pendapatan Daerah
30. Kecamatan Majalengka
31. Kecamatan Kadipaten
32. Kecamatan Jatiwangi
33. Kecamatan Dawuan
34. Kecamatan Jatitujuh
35. Kecamatan Ligung
36. Kecamatan Leuwimunding
37. Kecamatan Rajagaluh
38. Kecamatan Maja
39. Kecamatan Talaga
40. Kecamatan Cikijing
41. Kecamatan Bantarujeg
42. Kecamatan Sukahaji
43. Kecamatan Sumberjaya
44. Kecamatan Lemahsugih
45. Kecamatan Argapura
46. Kecamatan Kertajati
47. Kecamatan Panyingkiran
48. Kecamatan Palasah
49. Kecamatan Cigasong
50. Kecamatan Sindangwangi
51. Kecamatan Banjaran
52. Kecamatan Cingambul

53. Kecamatan Kasokandel

54. Kecamatan Sindang

55. Kecamatan Malausma

B. Badan Usaha Milik Daerah:

1. Perusahaan Daerah Air Minum

2. Perusahaan Umum Daerah Silih Asih

3. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Majalengka

4. Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha

C. Pemeriksaan BOS

Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Tim BOS Kabupaten dengan pengambilan uji petik/Sample beberapa sekolah.

D. Audit Kinerja Pemerintahan Desa

Audit Kinerja pada Pemerintahan Desa dilaksanakan pada 220 Desa yang terdiri dari :

1. 141 Pemerintahan Desa, dilaksanakan Post Audit Tahun 2019 dengan kriteria Pemerintahan Desa yang melaksanakan Pilkades serentak pada Tahun 2019
2. 80 Pemerintahan Desa, dilaksanakan Audit tahun 2020 dengan memperhatikan efektifitas waktu yang tersedia, menjelang habis masa jabatan kepala Desa dan tingginya nilai PAD.

VIII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERNAL DAN PELAPORAN

a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Temuan Hasil Audit Operasional/Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Wakil Bupati Majalengka bertanggung jawab atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Kepala Perangkat Daerah dan Desa selaku Entitas wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
3. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terkait Keuangan Negara maka Inspektorat Kabupaten menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan status tindak lanjut atau menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

b. Pelaporan

Setiap kegiatan Pengawasan akan di evaluasi dengan cermat terutama yang berkaitan dengan kinerja dan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Daerah, untuk itu Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada :

1. Laporan Hasil Audit Operasional/Kinerja disampaikan kepada Bupati dan entitas dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Laporan Hasil Pengawasan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Bupati.
3. Laporan Hasil Pemutahiran Data/Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan diajukan kepada Bupati dan Pejabat yang terkait.

IX. PENUTUP

Demikian Pokok-pokok Arah Kebijakan Pengawasan Fungsional Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 700/Kep.780A-Inspektorat/2020

Tanggal : 2 November 2020

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 700/Kep.959-Inspektorat/2019 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020.

JADWAL POST AUDIT

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. POST AUDIT PADA PEMERINTAHAN DESA										
1	DESA GANDU KEC. DAWUAN	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	DESA DAWUAN KEC. DAWUAN	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	DESA BALIDA KEC. DAWUAN	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	DESA KADIPATEN KEC. KADIPATEN	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	DESA BABAKAN ANYAR KEC. KADIPATEN	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	DESA LEUWIKIDANG KEC. KASOKANDEL	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	DESA RANJI WETAN KEC. KASOKANDEL	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	DESA JATIMULYA KEC. KASOKANDEL	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	DESA GANDASARI KEC. KASOKANDEL	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	DESA KERTAWINANGUN KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	DESA PALASAH KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	DESA BABAKAN KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	DESA KERTAJATI KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	DESA BANTARJATI KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	DESA SUKAMULYA KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	DESA MEKARJAYA KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	DESA SUKAKERTA KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	DESA SAHBANDAR KEC. KERTAJATI	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	DESA BIYAWAK KEC. JATITUJUH	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	DESA PANONGAN KEC. JATITUJUH	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
21	DESA RANDEGAN WETAN KEC. JATITUJUH	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	DESA PUTRI DALEM KEC. JATITUJUH	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dalnis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Peralatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	DESA JATITENGAH KEC. JATITUJUJUH	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	DESA BABA JURANG KEC. JATITUJUJUH	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	DESA JATIRAGA KEC. JATITUJUJUH	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	DESA SUMBER WETAN KEC. JATITUJUJUH	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	DESA SUMBER KULON KEC. JATITUJUJUH	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
28	DESA PASINDANGAN KEC. JATITUJUJUH	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	DESA JATIPAMOR KEC. PANYINGKIRAN	sangat rendah	2	Minggu II Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
30	DESA LEUWISEENG KEC. PANYINGKIRAN	sangat rendah	2	Minggu III Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
31	DESA PAJAJAR KEC. RAJAGALUH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
32	DESA SADOMAS KEC. RAJAGALUH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
33	DESA KUMBUNG KEC. RAJAGALUH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
34	DESA RAJAGALUH LOR KEC. RAJAGALUH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
35	DESA RAJAGALUH KEC. RAJAGALUH	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
36	DESA PATUANAN KEC. LEUWIMUNDING	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
37	DESA LEUWIKUJANG KEC. LEUWIMUNDING	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
38	DESA MIRAT KEC. LEUWIMUNDING	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
39	DESA LEUWIMUNDING KEC. LEUWIMUNDING	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
40	DESA HEULEUT KEC. LEUWIMUNDING	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
41	DESA BEUSI KEC. LIGUNG	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
42	DESA WANASALAM KEC. LIGUNG	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
43	DESA KERTASARI KEC. LIGUNG	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
44	DESA LEUWILIANG BARU KEC. LIGUNG	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
45	DESA BONGAS KULON KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
46	DESA GARAWANGI KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
47	DESA RANCAPUTAT KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
48	DESA SEPAT KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
49	DESA CIDENOK KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
50	DESA SUMBERJAYA KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
51	DESA PANCAKSUJI KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
52	DESA GELOK MULYA KEC. SUMBERJAYA	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	DESA MAJASUKA KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
54	DESA TRAJAYA KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
55	DESA BUNIWANGI KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
56	DESA WARINGIN KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
57	DESA PASIR KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
58	DESA ENGGALWANGI KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
59	DESA SINDANGWASA KEC. PALASAH	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
60	DESA BALAGEDOG KEC. SINDANGWANGI	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
61	DESA BURUJUL WETAN KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
62	DESA CICADAS KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
63	DESA ANDIR KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
64	DESA PINANGRAJA KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
65	DESA LEUWEUNGGEDE KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
66	DESA LOJI KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
67	DESA MEKARSARI KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
68	DESA SURAWANGI KEC. JATIWANGI	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
69	DESA GENTENG KEC. BANJARAN	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
70	DESA SANGIANG KEC. BANJARAN	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
71	DESA SUNIA BARU KEC. BANJARAN	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
72	DESA HEGARMAHA KEC. BANJARAN	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
73	DESA ARGAMUKTI KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
74	DESA SUKADANA KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
75	DESA SADASARI KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
76	DESA MEKARWANGI KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
77	DESA CIKARACAK KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
78	DESA HEUBEULISUK KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
79	DESA SUKASARI KIDUL KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
80	DESA TEJAMULYA KEC. ARGAPURA	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
81	DESA CIHAUR KEC. MAJA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
82	DESA WANAHAYU KEC. MAJA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Peralatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	DESA MAJA UTARA KEC. MAJA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
84	DESA BANJARAN KEC. MAJA	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
85	DESA PANIIS KEC. MAJA	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
86	DESA PAGERAJI KEC. MAJA	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
87	DESA KULUR KEC. MAJALENGKA	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
88	DESA SIDAMUKTI KEC. MAJALENGKA	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
89	DESA PADAHANTEN KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
90	DESA SUKAHAJI KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
91	DESA SALAGEDANG KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
92	DESA JAYI KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
93	DESA CIKONENG KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
94	DESA BABAKAN MANJETI KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
95	DESA TANJUNGSARI KEC. SUKAHAJI	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
96	DESA TAJUR KEC. CIGASONG	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
97	DESA BARIBIS KEC. CIGASONG	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
98	DESA BATUJAYA KEC. CIGASONG	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
99	DESA KARAYUNAN KEC. CIGASONG	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
100	DESA PASIR AYU KEC. SINDANG	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
101	DESA GARAWASTU KEC. SINDANG	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
102	DESA INDRAKILA KEC. SINDANG	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
103	DESA BANGBAYANG KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
104	DESA CIBULAN KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
105	DESA KEPUH KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
106	DESA KALAPA DUA KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu II Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
107	DESA MARGAJAYA KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
108	DESA MEKARWANGI KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
109	DESA SINARGALIH KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
110	DESA MEKARMULYA KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu III Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
111	DESA CISALAK KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
112	DESA DAYEUHWANGI KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	DESA LEMAHSUGIH KEC. LEMAHSUGIH	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
114	DESA CIPENDEUY KEC. BANTARUJEG	sangat rendah	2	Minggu IV Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
115	DESA BANTARUJEG KEC. BANTARUJEG	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
116	DESA HAURGEULIS KEC. BANTARUJEG	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
117	DESA SUKASARI KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
118	DESA CISOKA KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu V Januari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
119	DESA SINDANGPANJI KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
120	DESA JAGASARI KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
121	DESA BAGJASARI KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
122	DESA SUNALARI KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu I Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
123	DESA SUKAMUKTI KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
124	DESA CILANCANG KEC. CIKIJING	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
125	DESA MALAUSMA KEC. MALAUSMA	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
126	DESA BANYUSARI KEC. MALAUSMA	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
127	DESA KERAMAT JAYA KEC. MALAUSMA	sangat rendah	2	Minggu I Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
128	DESA SEDAREJA KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu II Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
129	DESA CIDADAP KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu II Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
130	DESA MANIIS KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu II Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
131	DESA CIMANGGUGIRANG KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu II Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
132	DESA CINGAMBUL KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu III Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
133	DESA CINTA ASIH KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu III Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
134	DESA MUKTISARI KEC. CINGAMBUL	sangat rendah	2	Minggu III Maret 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
135	DESA CIBEUREUM KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
136	DESA JATIPAMOR KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu II Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
137	DESA ARGASARI KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
138	DESA TALAGA KULON KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
139	DESA GANEAS KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
140	DESA MEKARRAHARJA KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu III Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
141	DESA MEKARHURIP KEC. TALAGA	sangat rendah	2	Minggu IV Februari 2020	1 Dainis, 1 Ketim, 1 Anggota	Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 5	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	AUDIT KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH									
1	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Tinggi	15	Minggu III Juni 2020 - Minggu II Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tinggi	9	Minggu II Juli 2020 - Minggu IV Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	DINAS SOSIAL	Tinggi	6	Minggu IV Juli 2020 - Minggu I Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Tinggi	6	Minggu I Agustus 2020 - Minggu III Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tinggi	8	Minggu III Agustus 2020 - Minggu I September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Tinggi	6	Minggu I September 2020 - Minggu II September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tinggi	6	Minggu II September 2020 - Minggu III September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Sangat Tinggi	14	Minggu III Juni 2020 - Minggu II Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tinggi	6	Minggu II Juli 2020 - Minggu IV Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tinggi	6	Minggu IV Juli 2020 - Minggu I Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tinggi	6	Minggu I Agustus 2020 - Minggu II Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tinggi	6	Minggu II Agustus 2020 - Minggu III Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	DINAS PERHUBUNGAN	Tinggi	6	Minggu III Agustus 2020 - Minggu I September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	sedang	6	Minggu I September 2020 - Minggu III September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	DINAS KESEHATAN	Sangat Tinggi	15	Minggu III Juni 2020 - Minggu II Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	RSUD MAJALENGKA	Tinggi	6	Minggu II Juli 2020 - Minggu III Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	RSUD CIDERES	Tinggi	6	Minggu III Juli 2020 - Minggu IV Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tinggi	6	Minggu I Agustus 2020 - Minggu II Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Tinggi	6	Minggu II Agustus 2020 - Minggu III Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Tinggi	6	Minggu IV Agustus 2020 - Minggu I September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Sedang	4	Minggu II Agustus 2020 - Minggu III Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	SEKRETARIAT DAERAH	Sangat Tinggi	16	Minggu III Juni 2020 - Minggu II Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tinggi	5	Minggu II Juli 2020 - Minggu III Juli 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tinggi	6	Minggu III Juli 2020 - Minggu I Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tinggi	7	Minggu I Agustus 2020 - Minggu II Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Tinggi	6	Minggu III Agustus 2020 - Minggu IV Agustus 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tinggi	6	Minggu IV Agustus 2020 - Minggu I September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	sedang	3	Minggu II September 2020 - Minggu II September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tinggi	7	Minggu II September 2020 - Minggu III September 2020	1 Wk.Pj, 1 Dainis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dainis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Saket/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksanaan	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	AUDIT KINERJA PADA BUMD									
1	PD SINDANGKASIH MULTI USAHA	Sedang	4	Minggu II November 2020 - Minggu II November 2020	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irbn 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	PDAM MAJALENGKA	Tinggi	4	Minggu II November 2020 - Minggu II November 2020	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irbn 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	PERUMDA SILIH ASIH	Sedang	3	Minggu II November 2020 - Minggu II November 2020	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irbn 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	PERUMDA BPR MAJALENGKA	Tinggi	4	Minggu II November 2020 - Minggu II November 2020	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 4 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irbn 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI